

Kapolres Mateng Keraahkan Puluhan Personel Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Oleh Forum Perjuangan Salulebbo Jilid 2

Rosmini - MAMUJUTENGAH.KAMPAI.CO.ID

May 16, 2023 - 07:47



Suasana dilokasi saat personil Polres Mateng mengawal Masyarakat salulebbo

Mamuju Tengah - Puluhan personel Polres Mamuju Tengah (Mateng) dikerahkan

dalam pengamanan aksi unjuk rasa oleh masyarakat Salulebbo yang mengatas namakan Forum perjuangan Salulebbo Jilid 2 di Lokasi Pembangunan Bendungan Budong-budong, Dusun Batupapan, Desa Salulebbo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah. Senin (15/5/2023).

Pada pengamanan ini masing-masing personel tersebut dikerahkan dengan mengamankan sejumlah titik guna mengantisipasi potensi kerawanan ataupun gangguan Kamtibmas saat aksi berlangsung.



Wakapolres Mateng Kopol Haeruddin, S.AP menghimbau kepada massa aksi untuk menghindari segala bentuk tindakan anarkis maupun provokasi yang dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas dan sebagainya supaya kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu, salah satu koordinator aksi bapak Nantur mengucapkan terimakasih kepada aparat Kepolisian yang telah mengamankan aksi dari awal sampai akhir.

"Kami ucapkan terimakasih kepada aparat kepolisian yang telah mengawal dan mengamankan jalannya aksi, semoga mendapat respon yang baik dari Perusahaan dan Pemerintah, dan keinginan warga dapat terpenuhi," ujar Nantur.



Nantur menjelaskan, Berdasarkan hasil keputusan musyawarah Forum Komunikasi Salulebbo Jilid 2 kami tadi malam pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 kami menuntut terkait pembebasan lahan yang sangat privat dan tidak terpublik serta tidak adanya transparansi soal penetapan nilai ganti rugi selama ini dan hanya diberikan nominal tanpa adanya rincian.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Relokasi jalanan dari Dusun Batu Papan ke Dusun Buntiti harus segera dikerjakan karena Akses jalan ini satu-satunya jalan utama untuk keluar dari desa menuju ke jalan utama.

"Setelah aksi ini kita tunggu apakah akan ada tindaklanjutnya, namun jika tidak maka kami akan menutup dan menghentikan aktifitas pembangunan Bendungan selama tidak ada kesepakatan harga bagi warga terdampak sampai ada tahap pembayaran dari perusahaan," ujar Nantur.